

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan daftar uji sistem pengendalian intern dapat diketahui bahwa secara umum penyelenggaraan sistem pengendalian intern di pemerintahan Kota Bukittinggi telah memadai. Hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern telah diterapkan secara umum dan berjalan efektif di pemerintahan Kota Bukittinggi, namun demikian penerapannya belum sempurna dan masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern.
2. Hasil pengujian dengan menggunakan daftar uji sistem pengendalian intern yang menyatakan bahwa secara umum penyelenggaraan sistem pengendalian intern di pemerintahan Kota Bukittinggi telah memadai dan berjalan efektif dengan skor 0,86. Hasil ini didapat dari penjumlahan ke lima unsur SPIP dengan rincian yaitu (1) lingkungan pengendalian 0,86 (2) penilaian resiko 0,81 (3) aktivitas pengendalian 0,84 (4) informasi dan komunikasi 0,94 (5) pemantauan pengendalian intern 0,85.
3. Meskipun hasil pengujian sistem pengendalian intern yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian intern di pemerintahan Kota Bukittinggi secara umum telah memadai namun

masih terdapat beberapa hal yang mesti diperbaiki dan disempurnakan seperti belum dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh semua pegawai dilingkungan pemerintah kota Bukittinggi, belum dibuatnya prosuder tertulis berupa instruksi kerja pemberian wewenang kepada pegawai untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan.

1. Masih terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyelenggaraan SPIP seperti adanya keterbatasan biaya dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi SPIP kepada semua pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, belum adanya kode etik yang mengatur aturan berperilaku bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, adanya pengabaian kebijakan dan prosedur serta kolusi yang dilakukan oleh pegawai yang mengakibatkan pengendalian tidak berjalan efektif.

1.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui masih terdapat beberapa hal yang harus disempurnakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Belum dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh semua pegawai dilingkungan pemerintah kota Bukittinggi.

Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi agar pakta integritas ditandatangani oleh semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

2. Belum dibuatnya prosuder tertulis berupa instruksi kerja pemberian wewenang kepada pegawai untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi agar memerintahkan masing-masing pimpinan SKPD untuk membuat instruksi tertulis dalam pemberian wewenang kepada pegawai agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

3. Belum adanya kode etik pegawai yang mengatur aturan berperilaku bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membuat kode etik bagi pegawai untuk mengatur perilaku pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga dengan adanya kode etik ini dapat menghindari terjadinya pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

4. Belum terselenggaranya sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi SPIP secara bertahap kepada semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

5. Terjadinya pengabaian kebijakan dan prosedur serta kolusi oleh pegawai.

Hal ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota disarankan untuk melakukan perbaikan atas sistem dan prosedur yang telah ada dengan melakukan pengembangan berkelanjutan yang bisa menutup celah untuk melakukan pengabaian terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ada serta

melakukan monitoring secara berkelanjutan untuk meyakini bahwa pengendalian masih sesuai dengan tujuan dan resiko yang dihadapi oleh instansi pemerintah.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Informan/narasumber yang mengisi daftar uji dalam penelitian ini masih terbatas pada beberapa orang pejabat eselon II, III dan IV (khususnya PPK) yang berasal dari beberapa dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sehingga belum mewakili seluruh pegawai dan SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
2. Tidak semua parameter unsur-unsur SPIP yang diuji dalam penelitian ini, penelitian ini hanya menguji 42 parameter dari 87 parameter yang terdapat pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-500/K/2010 Tentang Pedoman Pemetaan (*Diagnostic Assesment*) Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan penulis untuk menyesuaikan parameter yang diuji dengan narasumber/informan yang mengisi daftar uji tersebut.

5.4. Saran

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya keterbatasan penelitian di atas dilengkapi yaitu:

1. Memperbanyak jumlah informan serta parameter yang diuji sehingga informasi yang diperoleh lebih menggambarkan efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan skala pengukuran lain dalam penilaian unsur-unsur SPIP.

